

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan unsur yang begitu penting dalam menopang kehidupan serta penghidupan manusia. Sementara keberadaan tanah tidak hanya sebagai faktor penunjang kemakmuran bangsa Indonesia semata, tetapi juga memiliki andil yang cukup besar sebagai sumber perselisihan atau konflik. Tanah juga merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanah memiliki beberapa fungsi, seperti: fungsi sosial, fungsi ekonomis, dan fungsi religius. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah diatur berdasarkan hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional. Menurut A. P. Parlindungan, bahwa dari hak atas tanah, ada yang didirikan sebagai bangunan untuk papan (tempat tinggal), hunian yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.¹ Artinya kebutuhan dasar manusia akan terpenuhi dengan adanya tanah tersebut dan Benhard Limbong memberikan pendapat serupa bahwa tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting karena sebagian besar dari kehidupannya tergantung pada tanah.²

Selain sebagai tempat mereka tinggal, tanah juga adalah sebagai tempat menjalani kehidupan, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman roh halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat dan karenanya orang-orang tergantung kepadanya. Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas

¹ A. P. Parlindungan, 2001, Komentor Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman dan Undang - Undang Rumah Susun, Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

² Benhard Limbong, 2012, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, hal. 2

dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Permasalahan mengenai tanah bagi masyarakat merupakan masalah yang sangat urgent, karena tidak hanya menyangkut masalah ekonomi saja tetapi juga menyangkut masalah kesejahteraan sosial yang langsung menyangkut hak-hak perorangan warga masyarakat, terutama dengan bertambah majunya pembangunan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga sering terjadi sengketa tanah diantara sesamanya.

Secara ekonomis, tanah tidak akan pernah mengalami penurunan harga, bahkan cenderung semakin meningkat dari hari ke hari. Mengingat besarnya fungsi dan keutamaan tanah bagi kehidupan manusia, tidak heran jika semua orang saat ini berlomba-lomba untuk memperoleh tanah yang seluas-luasnya. Di Indonesia tanah sering menjadi sumber permasalahan bahkan menjadi konflik yang menelan korban harta benda dan nyawa. Kondisi ini disinyalir disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu (1) belum adanya pola administrasi yang jelas mengenai kepemilikan tanah, (2) masih banyaknya tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat, (3) tanah yang dikuasai oleh seseorang belum tentu kepemilikannya ada pada orang yang menempati, (4) proses pewarisan tanah tidak ditetapkan melalui mekanisme hukum, (5) masih adanya tanah yang penguasaannya secara komunal yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan konflik, dan (6) adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk menggagalkan proses hukum pertanahan.

Kondisi empiris sebagaimana digambarkan di atas, juga terjadi pada masyarakat Bali. Masyarakat Bali sebagai komunitas sosial yang sebagian besar

penduduknya mengandalkan sektor pertanian dan pariwisata, memaknai tanah sebagai tempat dan ruang yang harus diharmoniskan dan dijaga sesuai dengan filosofi *Tri Hita Karana*. Menurut ajaran *Tri Hita Karana* atau tiga penyebab keharmonisan ada tiga unsur penting yang harus dijaga, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hubungan antara manusia dengan alam inilah yang dimaknai sebagai hubungan yang religius dan magis antara manusia dengan tempat hidupnya.

Ada 2 hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu :

1. Berdasarkan sifatnya ialah karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap, walaupun mengalami keadaan-keadaan yang bagaimanapun, bahkan menjadi lebih menguntungkan. Misalnya : sebidang tanah yang di atasnya tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, jika dibakar dan setelah api padam, tanah tersebut akan muncul lagi, tetap berwujud tanah seperti semula. Jika dilanda banjir, maka setelah airnya surut, muncul kembali sebagai sebidang tanah yang lebih subur dari semula.
2. Berdasarkan fakta ialah suatu kenyataan, bahwa tanah itu :
 - a. Merupakan tempat tinggal dari kelompok orang
 - b. Memberikan kehidupan pada kelompok orang
 - c. Merupakan tempat di mana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan
 - d. Merupakan pula tempat tinggal dari roh-roh suci leluhur

Pertalian antara manusia dengan tanahnya, demikian sangat erat, karena merupakan unsur yang berpasangan dan seharusnya dapat dianggap sebagai pertalian hukum umat manusia dengan tanah. Melihat kenyataan yang demikian maka antara kelompok orang dengan tanah yang didiaminya terdapat hubungan yang amat erat, serta bersifat “religius magis“. Hubungan yang erat dan bersifat religius magis ini menyebabkan kelompok orang, memperoleh hak untuk menguasai tanah dalam arti memanfaatkan tanah itu memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu serta berburu terhadap binatang-binatang yang ada di kawasan tersebut

Ternyata dari jaman dahulu tanah yang didiami oleh kelompok orang yang jelas ada wujudnya yang sebagai pemimpin kelompok dapat mengatur penggunaan tanah, yang sifatnya turun-temurun, bagaikan sebuah warisan dari leluhurnya, kiranya inilah disebut “tanah adat“.

Maka itu penggunaan tanah adat dapat berlaku ke dalam (kelompok adat) dan dapat juga berlaku keluar, seperti :

1. Kelompok persekutuan itu beserta warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah-tanah adat yang ada di sekitarnya
2. Orang luar hanya boleh menggunakan tanah tersebut, dengan izin penguasa kelompok persekutuan tersebut, tanpa izin itu dianggap melakukan pelanggaran
3. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah kekuasaannya, untuk kepentingan mereka bersama

4. Persatuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan pelanggaran
5. Hak atas tanah adat yang sudah digarap yang sudah diliputi oleh hak perseorangan

Kehidupan masyarakat Bali terus bergerak. Globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan masyarakat³. Proses modernisasi secara perlahan tetapi pasti telah mengubah pola pikir dan pandangan masyarakat Bali dalam memaknai tanah dan kehidupannya. Lebih-lebih, kemajuan pariwisata telah mendorong pesatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga merambah ke pelosok-pelosok perdesaan, membuat nilai dan kebutuhan akan tanah terus meningkat. Pembangunan fasilitas pariwisata, seperti hotel, resort, villa, restoran, dan lain-lain, telah menjadikan tanah sebagai komoditas yang sangat bernilai ekonomi tinggi dan melemahkan nilai-nilai sosial-religiusnya. Perkembangan pariwisata yang pesat ini dibarengi semakin menguatnya nilai-nilai individualisme dalam masyarakat membuat egoisme dan keserakahan masyarakat untuk mengejar kesenangan pribadi (hedonisme) semakin tidak terkendali. Kondisi yang telah dipaparkan dalam penjabaran di atas tersebut berpengaruh terhadap pola pengelolaan tanah adat yang semula lebih bersifat komunal dan religious

³ Suwardani, N. P. (2015). Pewarisan nilai-nilai kearifan lokal untuk memproteksi masyarakat Bali dari dampak negatif globalisasi. *Journal of Bali Studies*, 5(2), h.262.

mengarah kepada pengelolaan yang bersifat individual untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kepentingan pribadi semata⁴.

Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu desa Bali Mula yang masih memelihara tradisi dan nilai-nilai tradisional masyarakat Bali. Tatanan sosial/budaya masyarakat Penglipuran memperlihatkan bahwa *desa adat* merupakan simbol sakralisasi yang telah bertahan ratusan mungkin ribuan tahun, memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Hal ini bisa dilihat dari eksistensi politis dan sosiologis yang dilakukan oleh desa adat dalam memajukan maupun mempertahankan nilai-nilai kultural masyarakat setempat.⁵

Desa Adat Penglipuran merupakan satu kawasan pedesaan yang memiliki tatanan spesifik dari struktur desa tradisional, sehingga mampu menampilkan wajah pedesaan yang asri. Penataan fisik dari struktur desa tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakatnya yang sudah berlaku turun temurun. Sehingga dengan demikian Desa Adat Penglipuran merupakan obyek wisata budaya. Keasrian Desa Adat Penglipuran dapat dirasakan mulai dari memasuki kawasan pradesa dengan hijau rerumputan pada pinggiran jalan dan pagar tanaman menepi sepanjang jalan, menambah kesejukan pada daerah prosesi desa.⁶

Di Desa Adat Penglipuran terdapat lima kategori tanah, yaitu: (1) Tanah milik, (2) *Tanah Druwe* atau sering disebut juga *Druwe Desa*, (3) *Tanah Laba Pura*,

⁴ Guntur, I.G.N. , Yahman & Puri, W.H. (2013). *Dinamika Pengelolaan Tanah Adat di Kabupaten Gianyar dan Bangli Provinsi Bali*. Dalam Pujiriyani, D.W. & Puri, W.H. (ed.): *Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, h.35.

⁵ Lasmawan, *Kebertahanan Desa Adat Dalam Menyelesaikan Konflik-Konflik Kemasyarakatan Di Kalangan Masyarakat Desa Kuno (Bali Age) Di Kabupaten Bangli (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Adat Penglipuran dalam Bidang Hukum Adat Perkawinan dan Pewarisan)* Artikel Online. <http://oldpasca.undiksha.ac.id>, diakses tanggal 20/06/2019

⁶ Ibid

(4) *Tanah Pekarangan Desa*, dan (5) *Tanah Ayahan Desa*. Selain tanah milik, semua jenis tanah yang ada di Desa Adat Penglipuran tidak memiliki sertifikat, karena dianggap sudah menjadi milik desa adat dan semua kramanya.

Sementara di sisi lain, Undang-Undang Pokok Agraria, mewajibkan setiap warga negara Indonesia yang memiliki tanah untuk menyertifikatkan tanahnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi persengketaan dan konflik kepemilikan tanah yang tidak bersandar pada hukum nasional yang berlaku⁷. Di Desa Adat Penglipuran sendiri telah terjadi berbagai macam sengketa tanah, khususnya yang berkaitan dengan konflik penyertifikatan tanah *ayahan desa*, konflik penggarapan tanah *druwen desa*, dan perbatasan tanah *ayahan desa* antara *krama* yang satu dengan yang lainnya. Menurut masyarakat setempat, konflik perbatasan tanah *ayahan desa* ini distimulir oleh ketidakpastian yuridis sampai di mana batas tanah *ayahan desa* mereka, walaupun ada kitir pembayaran pajak yang menunjukkan luas tanah sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu banyak warga masyarakat Desa Adat Penglipuran yang memprotes keputusan pelarangan terhadap penyertifikatan tanah *ayahan desa* yang mereka miliki. Bagi mereka, penyertifikatan tanah *ayahan desa* dimaksudkan agar mereka memiliki kekuatan hukum yang pasti jika terjadi sengketa tanah. Dipihak lain, desa adat menganggap penyertifikatan tanah *ayahan desa* akan menyebabkan penjualan tanah desa adat yang akan berimplikasi pada konflik adat dan pengikisan keberthanan nilai-nilai sosial religius masyarakat Desa Adat Penglipuran

⁷ Undang – undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Walaupun demikian keberadaannya namun dengan adanya perkembangan jaman, maka perlu bagi kita masyarakat Hindu di Bali dengan adat-istiadatnya, dapat mempertahankan tanah adat, karena hal itu bersangkutan paut dengan kehidupan beragama.

Pada hakekatnya keberadaan masyarakat adat diakui *The Founding Fathers* dalam menyusun UUD 1945. Dalam Rapat Besar Tanggal 15 Juli 1945, Supomo mengemukakan bahwa terdapat daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, yaitu *Volksgemeinschaften*, yaitu daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat seperti misalnya Jawa: desa, di Minangkabau: *nagari*, di Palembang: *dusun*, dan daerah kecil yang dinamakan *marga*, di Tapanuli: *huta*, di Aceh: *kampung*. Selain itu terdapat juga daerah istimewa – daerah kerajaan (*zelfbestuurende landschappen*), yang harus dihormati dalam bentuk susunannya yang asli.⁸ Pasca kemerdekaan, upaya-upaya yang mendukung masyarakat adat beserta hak-haknya tidaklah merupakan sesuatu yang populer sehubungan dengan adanya pola perjuangan yang bercorak ‘kelas’, dan upaya tersebut dapat dilihat sebagai dukungan pada kolonial Belanda mengingat banyaknya pemimpin adat yang ‘memihak’ dan memperoleh fasilitas dari Pemerintah Kolonial Belanda.⁹

Di Indonesia, kata masyarakat adat merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*indigenous people*”.¹⁰ *Indigenous people* diartikan juga sebagai

⁸ Mohammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, Yayasan Prapanca, Jakarta, hlm. 310.

⁹ Suraya Afiff and Celia Luwe, 2007, ‘Claiming Indegenous Community: Political Discourse and National Resource Rights in Indonesia’ in *Alternatives*, 32, hlm 89

¹⁰ Pengertian *indigenous peoples* menurut Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 adalah: *peoples in independent countries who regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical regions to which the country belongs, at the time of conquest or colonisations or the establishment of present state boundaries*

masyarakat asli atau penduduk asli. Tetapi istilah masyarakat asli atau penduduk asli jarang dipakai dalam konteks "masyarakat adat" karena terlalu umum dan kurang tepat untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya dari masyarakat adat. Istilah masyarakat adat lebih tepat memberikan gambaran tentang keberadaan mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, baik agama, hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya.¹¹ Pengertian ini sesuai dengan hasil Kongres Masyarakat Adat Nusantara I di Jakarta pada tanggal 17 s/d 22 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: masyarakat adat ialah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

Selain istilah di atas, *indigenous people* juga diterjemahkan sebagai masyarakat hukum adat,¹² komunitas adat terpencil atau masyarakat terasing, masyarakat tradisional, masyarakat lokal dsb. Di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat¹³ disebutkan bahwa masyarakat hukum adat ialah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Masyarakat Terasing atau Komunitas Adat Terpencil menurut

and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.

¹¹ Anonim, 2001, *Masyarakat Adat Di Dunia. Eksistensi dan Perjuangannya*. International Work Group for Indigenous Affairs – Institut Dayakologi. Pontianak, hal.23.

¹² Van Vollenhoven, 1981, *Indonesian Adat Law*. Edited By J.F Holleman hlm 69

¹³ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Keputusan Presiden No.111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial¹⁴

Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. Selain masyarakat adat, beberapa istilah lain yang digunakan untuk menyebut masyarakat adat adalah masyarakat hukum (Hazairin)¹⁵, persekutuan hukum (Djojodiguno).

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, dan menuangkan ke dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG TANAH AYAHAN DESA DI DESA PAKRAMAN (STUDI KASUS DI DESA ADAT PENGLIPURAN)”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa tanah *ayahan desa* di Desa Adat Penglipuran tidak boleh disertifikatkan?
2. Bagaimanakah bentuk dan intensitas konflik tanah *ayahan desa* di Desa Adat Penglipuran ?
3. Hak-hak apa sajakah yang dimiliki oleh krama Desa Adat Penglipuran dalam pengelolaan dan penguasaan tanah *ayahan desa* di Desa Adat Penglipuran menurut hukum positif Indonesia ?

¹⁴ Keputusan Presiden No.111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial

¹⁵ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 31.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan permasalahan tanah *ayahan desa* di Desa Adat Penglipuran dalam konflik pembuatan Sertifikat Tanah oleh Krama Desa.
2. Untuk memahami bentuk dan intensitas konflik tanah *ayahan desa* di Desa Adat Penglipuran.
3. Untuk menjelaskan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh krama Desa Adat Penglipuran dalam pengelolaan dan penguasaan tanah *ayahan desa* di Desa Adat Penglipuran menurut hukum positif Indonesia

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangan ilmu lebih mendalam tentang pengelolaan dan penguasaan tanah *ayahan desa* di Desa Adat Penglipuran

2. Manfaat praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini memiliki manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini, antara lain :

1. Bagi masyarakat, dapat diberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang hukum adat, serta dapat dipakai sebagai acuan

dalam menyelesaikan sengketa tanah *ayahan desa* dalam pengelolaan maupun penguasaannya.

2. Bagi peneliti, di samping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang hukum waris dan perdata terutama hukum waris adat Bali.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini secara metodologis menggunakan metode pendekatan Socio Legal¹⁶, Metode Penelitian Sosio Legal yaitu metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum karena melalui pendekatan ini peneliti diharapkan mampu menggali dan memformulasikan rasional pelarangan penyertifikatan tanah *ayahan desa*, bentuk dan intensitas sengketa tanah *ayahan desa*, dan model penyelesaian sengketa tanah *ayahan desa* di Desa Adat Penglipuran berdasarkan nilai-nilai sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini akan dimulai dari observasi awal untuk menentukan urgensi masalah, melakukan wawancara secara mendalam, memfokuskan data dan mendeskripsikan data sesuai dengan alur penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian terdiri atas beberapa pihak dengan pertimbangan bahwa para pihak memiliki kualitas dan ketepatan untuk berperan sebagai subjek penelitian sesuai dengan tuntutan karakteristik

¹⁶http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-PengantarKuliahMetodePenelitianSosioLegal.html. di akses pada tanggal 20 februari 2019

masalah penelitian. Teknik penarikan dan pengembangan informan penelitian dilakukan secara bertujuan (*purposive sampling technique*), kemudian jumlah dan jenisnya dikembangkan secara “*snowball sampling technique*” bergulir sampai tercapainya kejenuhan data atau informasi/data telah terkumpul secara tuntas.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan untuk menemukan jawaban terhadap kasus yang akan diteliti oleh penulis. Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Adat Penglipuran Bali yang merupakan pusat persoalan dalam penelitian ini.

3. Sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum campuran maka jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Data primer, sekunder dan tersier yang di gunakana dalah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, informasi atau pendapat yang diperoleh langsung dari sumber utama/pertama.¹⁷ yang mana hal ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan paenduduk Desa Penglipuran.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah jenis data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui bahan-bahan literatur seperti undang-undang, peraturan-

¹⁷ Fakultas Hukum, 2016, *pedoman penulisan hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hal 17.

peraturan, jurnal dan buku. Studi dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak terkait dengan cara mencatat atau meringkas dokumen-dokumen, serta penelusuran situs-situs internet yang berhubungan dengan kasus yang diteliti.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah jenis data yang memberikan petunjuk atau penjelasan-penjelasan bahan hukum primer dan skunder, seperti Ensiklopedia, Kamus, Glossary dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Instrumen penelitian dalam penelitian ini, menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian (human instrumen). Selama berlangsungnya pengumpulan data, peneliti dalam kapasitasnya sebagai instrumen penelitian, menggunakan beberapa alat bantu pengumpul data, seperti : (1) pedoman wawancara, (2) observasi, (3) dokumentasi, dan (4) kamera foto sebagai alat perekam situasi. Berdasarkan prinsip human instrumen yang dianut dalam penelitian ini, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: kata-kata, tindakan, situasi dan peristiwa, serta dokumen yang dapat diobservasi.

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Arikunto menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun

masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat¹⁸. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari prajuru adat Desa adat Penglipuran, krama Desa adat Penglipuran.

1. I Wayan Supat sebagai Ketua Desa adat Penglipuran
 2. I Nyoman Rima sebagai Krama Desa adat Penglipuran
 3. I Gede Ari Sudananjaya sebagai Krama Desa adat Penglipuran
 4. I Komang Nonik sebagai Krama Desa adat Penglipuran
- b. Observasi

Menurut Ngalim Purwanto dalam Basrowi dan Suwandi¹⁹, Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat tingkah laku dan kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya²⁰. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder seperti data persebaran, monografi daerah penelitian, sejarah singkat, peta

¹⁸ Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 199

¹⁹ Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 94

²⁰ Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 206

daerah penelitian, dan sebagainya, guna melengkapi dan memberi penjelasan terhadap fenomena daerah serta objek penelitian.

5. Analisa Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, mengkategorikan dan mengklasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian. Peneliti dalam kegiatan ini, akan berusaha memunculkan makna dari setiap data yang ada, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif melainkan menyentuh dimensi transenden.

F. Sistematika penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, hal ini bertujuan agar mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisannya secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. Sub bab diuraikan lebih lanjut mengenai metode pendekatan, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi tentang kajian teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang Tinjauan yuridis sosiologis terhadap Penyertifikatan tanah ayahan desa di Bali (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Penglipuran)

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis yang selanjutnya akan dianalisis secara sistematis, guna mengkaji, menyelesaikan dan menyelaraskan hasil penelitian dengan kenyataan yang ada terhadap objek yang diteliti serta didukung dengan bahan hukum dan teori teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum ini, yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan berisikan saran dari penulis guna menanggapi permasalahan yang diteliti